

## NU Pasca Muktamar: Kritik dan Harapan

### Pengantar

Beberapa tahun belakangan ini, NU telah bergerak secara simultan dalam konteks pemberdayaan *civil society*. *Civil society* dalam pengertian komunitas yang terorganisir, mandiri dan otonom serta relatif tidak tergantung ke negara. Pilihan gerakan ini muncul bersama dengan keputusan untuk kembali ke khittah 1926 pada tahun 1984. Khittah dalam pada ini di satu pihak dipahami sebagai kembali kepada gerakan sosial-keagamaan karena orientasi yang berlebihan ke politik menyebabkan pengebirian —keterlambatan NU dalam menyadari pentingnya— menjaga kontinuitas sumberdaya manusia yang ada di dalamnya. Di pihak lain, khittah dimaknai membebaskan warganya untuk memilih partai (berpolitik) di mana pemaknaan seperti ini sebenarnya mencerminkan akumulasi kekecewaan politik yang begitu besar yang mendorong NU untuk keluar dari arena politik praktis.

Maka khittah membuka peluang lebar-lebar bagi NU untuk memainkan peranan pada sisi yang lain yakni membangun tradisi kritis atas negara. Seperti kita lihat, pilihan ini telah melahirkan begitu banyak segmen NU terutama dari basis gerakan kaum mudanya yang bergerak di level masyarakat dengan berbagai varian aktivitas sosial dan ideologi politik yang mereka kembangkan. Ringkasnya, NU pasca khittah NU telah cukup sukses memainkan peranan dengan gerakan-gerakan kulturalnya yang memilih berada di luar negara.

Gerakan kultural pasca khittah ini dalam pengertian tertentu bisa kita lihat sebagai suatu fase politik yang belum selesai tetapi implikasi-implikasi struktural dan kulturalnya sudah mulai jelas terasa. Implikasi struktural yang lahir secara mengejutkan adalah terpilihnya Gus Dur menjadi presiden keempat di republik ini. Yang terjadi kemudian disengaja atau lebih karena blessing in Disguise, pada akhirnya "NU masuk negara". Yang jelas di sini betapa implikasi-implikasi struktural dan kultural bagi kita telah sedemikian terlihat dan menonjol.

Barangkali sebagian besar lapisan muda NU pada umumnya tengah mengalami dilema moral dan kultural. Mereka kesulitan untuk mengambil peranan apa yang pantas dilakukan di tengah situasi di mana NU telah menjadi representasi dari negara itu sendiri. Dilema ini semakin terasa manakala sebagian besar kaum muda NU memilih berada di jalur kultural, seperti; melakukan pendampingan buruh, mengurus masalah TKI, anak jalanan, bahkan melakukan kajian-kajian pemikiran alternatif. Dilema itu seperti kita tahu, pertama-tama dan yang utama adalah kesulitan kita merumuskan agenda kerja dan orientasi menumbuhkembangkan *civil society* di Indonesia. Bukan karena apa-apa, tetapi lebih disebabkan bahwa cita-cita kemandirian dan otonomi yang hendak kita perjuangkan justru mengalami tantangan kontinuitas sikap, konsistensi dan keberpihakan yang jelas, pada saat kita menjumpai institusi yang hendak kita kritik itu tidak lain adalah tempat dari mana kita mempelajari dan mengambil inspirasi gerakan kritis kita.

Dengan latar yang demikian, NU pasca Muktamar menghadapi tantangan yang sangat besar khususnya mencari jawaban-jawaban persoalan kontinuitas gerakan kulturalnya. Selain permasalahan ini, NU menghadapi banyak lagi permasalahan lain seperti lemahnya manajemen organisasi, pengembangan sektor ekonomi, konservatisme pemikiran keagamaan, mencari hubungan yang pas NU PKB dan sebagainya.

Dalam Galeri kali ini, disajikan opini mengenai berbagai persoalan yang dihadapi NU dari beberapa orang "jama'ah NU" dari berbagai kalangan, baik yang masih disebut "orang NU" maupun yang telah mengalami proses diaspora. Mereka adalah Anas Urbaningrum, Bahtiar Effendy, Faishol Reza, Khoffiah Indar Parawansa dan Said Budairi.

## Kontinuitas Proyek Kultural Perlu Dijamin

ANAS URBANINGRUM  
Ketua Umum PB HMI

Sejak tahun 80-an dan 90-an saya melihat ada gelombang cukup besar anak-anak muda NU masuk pendidikan tinggi yang bukan hanya pendidikan tinggi agama, tapi juga pendidikan tinggi umum. Ini merupakan bola salju yang setiap hari akan terus membesar. Hal ini mendorong tumbuhnya sebuah kekuatan baru yang berbasis pada gerakan-gerakan kultural. Akan tetapi saat ini anak-anak muda NU cukup banyak yang mengalihkan konsentrasinya kepada masalah-masalah yang terkait dengan politik praktis. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari pilihan taktis yang diambil NU. Ketika definisi khittah lebih diaksentuasi pada proyek-proyek kultural, energi anak-anak muda NU mau tidak mau lebih banyak berorientasi pada upaya-upaya pengkondisian pertumbuhan budaya. Namun sewaktu orang-orang NU membentuk wadah politik yang berupa partai, dan jumlahnya pun lebih dari satu, sebagian energi yang ada, bahkan mungkin sebagian besar, otomatis kemudian terserap oleh kebutuhan politik praktis tersebut. Ini bisa mempunyai konsekuensi positif-produktif,

dan sebaliknya bisa berdampak negatif bagi kalangan NU, khususnya barisan mudanya. Konsekuensi produktif bisa dicapai apabila terserapnya energi anak-anak muda NU ke dalam wadah politik praktis itu dibarengi oleh jaminan kontinuitas proyek-proyek kultural yang sedang berjalan. Tetapi jika proyek-proyek kultural ini malah terhenti gara-gara meningkatnya aktivitas politik praktis, maka akan kontra produktif bagi pertumbuhan dan perkembangan NU di masa mendatang.

Dalam situasi normal, kerja-kerja struktural biasanya akan punya imbas kepada kerja-kerja kultural. Hanya saja tantangan yang dihadapi sekarang ini sesungguhnya menyangkut masalah psiko politik. Selama ini sepertinya NU merasa mengalami marjinalisasi politik, dan pasti secara psikis, hasrat untuk bekerja dalam wilayah struktural biasanya meledak-ledak. Kalau tidak bisa dikendalikan secara proporsional bakal melahirkan sikap-sikap yang kurang baik. Tapi jika fase ini berhasil dilewati dengan cukup mulus, maka peluang kemajuan yang lebih bersifat produktif akan relatif tidak sulit tercapai. Memang untuk sementara waktu kerja-kerja kultural bisa jadi kekurangan energi. Kendati begitu pada saat tertentu ketika sudah ada keseimbangan, sangat mungkin kerja kultural tersebut tidak menjadi anak tiri.

Prasyarat untuk ini menurut saya harus terdapat pluralitas orientasi. Jadi mesti ada kerja sistematis dari PBNU misalnya, untuk membagi energi keluarga besar NU, mana yang lebih pas masuk ke wilayah struktural, yakni politik praktis, secara sungguh-sungguh, dan mana yang relevan untuk